



Perketat Prokes di Tingkat Desa

LANGKAH KPU AGAR PILKADA TAK JADI KLASER BARU

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta penerapan protokol kesehatan (prokes) di desa-desa diperketat.

Lugas Subarkah, Jumali,
& Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Permintaan Sultan itu disampaikan untuk merespons meningkatnya kasus positif Covid-19 di DIY. Menurut Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu, saat ini penularan bukan saja terjadi karena seseorang bepergian, melainkan terjadi di lingkungan terdekat. "Dari data-data yang masuk tiap hari, tidak hanya masalah pergi tapi sudah sesama tetangga," kata Sultan kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (4/12). Berdasarkan kondisi itu, Sultan mengimbau agar masyarakat menegakkan protokol kesehatan hingga di lingkungan terkecil. "Protokol kesehatan semakin penting. Saya imbau [protokol kesehatan] diperketat di desa-desa," ungkapnya.

Ayah lima putri ini meminta pemerintah desa betul-betul memastikan warganya menerapkan protokol kesehatan. Langkah

▶ Sultan mengimbau agar masyarakat menegakkan protokol kesehatan hingga di lingkungan terkecil.

▶ Satgas Penanganan Covid-19 Pusat mengimbau agar masa libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang tidak menjadi musim panen kasus Covid-19.



itu, ujar Sultan, untuk mencegah munculnya kluster baru penyebaran Covid-19. "Jadi protokol itu jadi makin

penting, karena dalam *report* ini, ini sudah di-*tracing* ternyata bertemu dengan nomor sekian. Berarti kan antarlingkungan ini, bukan kluster dalam arti kluster seperti di sekolah enggak, tapi di kalangan warga masyarakat sendiri," ujarnya.

Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 181 penambahan kasus positif pada Jumat berdasarkan pemeriksaan pada 1.421 sampel dari 1.129 orang. Kabupaten Sleman mendominasi penambahan ini sebanyak 92 kasus, disusul Kota Jogja (39), Bantul (34), Kulonprogo (14), dan Gunungkidul (2).

▶ Halaman 5

Perketat Prokes...

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif sebanyak (88 kasus), periksa mandiri (56 kasus), perjalanan luar daerah (1 kasus), dan belum ada keterangan (36 kasus).

Jumlah kasus sembuh tercatat 76 kasus dengan rincian Kota Jogja (23 kasus), Bantul (52 kasus), dan Sleman (1 kasus). Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 6.565 kasus, dengan rincian 1.768 kasus aktif, 4.649 kasus sembuh dan 148 kasus meninggal.

Adapun penggunaan *bed* di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 34 *bed*, sisa 29 *bed*. Untuk nonkritikal digunakan 398 *bed*, sisa 94 *bed*. Total pemeriksaan di DIY hingga hari ini sudah dilakukan pada 116.347 sampel dari 98.374 orang.

Libur Akhir Tahun

Satgas Penanganan Covid-19 Pusat mengimbau agar masa libur panjang Natal dan akhir tahun mendatang tidak menjadi musim panen kasus Covid-19. Berdasarkan pengalaman liburan panjang sebelumnya, peningkatan jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif terjadi pada sekitar dua pekan setelahnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dalam mengantisipasi kasus positif di masa libur panjang akhir tahun, Satgas Covid-19 menyarankan seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan. "Lakukan ini tanpa pandang bulu kepada seluruh masyarakat," ujar Wiku.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berani dan tegas membubarkan kerumunan dan melakukan amplifikasi kampanye 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci

tangan. Masyarakat harus mengerti bahwa di masa pandemi ini, aplikasi 3M merupakan kewajiban dan bukan pilihan.

Selain itu, kata Wiku, masyarakat diminta untuk bijaksana dan sadar untuk meminimalisasi mobilitas.

Berdasarkan hasil temuan dari Yilmazkuday pada 2020, menyebutkan peningkatan intensitas untuk tetap di dalam rumah. Dari hasil studinya, dengan mengurangi kunjungan ke area publik sebesar 1%, sudah dapat mengurangi puluhan kasus dan kematian Covid-19 per pekan.

"Temuan ini harusnya dapat memotivasi kita semua untuk mengambil pilihan bijak yaitu tinggal di rumah dan menghindari keramaian," ungkapnya.

Adapun, Pemkab Bantul terus memaksimalkan pengetatan protokol kesehatan di sejumlah objek wisata untuk mencegah adanya ledakan kasus Covid-19 sesuai libur panjang.

Selain itu, Pemkab juga akan memaksimalkan penegakan protokol kesehatan. "Mereka akan memonitor lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan," kata Sekda Bantul Helmi Jamharis.

Helmi mengaku bersyukur karena adanya keputusan pengurangan cuti bersama oleh pemerintah. Dengan keputusan itu, kemungkinan ledakan kasus Covid-19 sesuai libur panjang tidak terjadi. "Tentunya dengan kondisi seperti ini, ya kami *wait and see*. Kami tak lakukan upaya mendorong agar wisatawan berbondong-bondong datang," katanya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, akan memastikan destinasi wisata, hotel, restoran dan semua tempat-tempat umum menjalankan protokol kesehatan khususnya pada libur panjang akhir tahun. "Di masa liburan tidak cukup hanya 4M, tetapi juga pembatasan jumlah pengunjung dalam waktu

bersamaan agar tidak terjadi kerumunan, pengaturan alur masuk keluar dan pencatatan *scanning QR Code*," katanya.

Heroe menambahkan Pemkot Jogja melalui operasi gabungan akan melakukan sidak-sidak di tempat-tempat umum.

Khusus di Malioboro, kata Heroe petugas gabungan akan memastikan penerapan prokes. Heroe meminta siapapun untuk memindai Kode QR, tentunya dengan penerapan prokes lainnya seperti memakai masker, cuci tangan atau membawa *hand sanitizer*, jaga jarak, dan tidak berkerumun.

Libur panjang sebenarnya berpotensi positif buat lonjakan ekonomi bagi masyarakat Jogja.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yudiantana, saat libur akhir tahun masyarakat dan sejumlah pelaku usaha diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Karena kuncinya hanya itu [penguatan protokol pencegahan penularan Covid-19]. Kalau ingin menyambut banyak wisatawan ya kuncinya penguatan protokol Covid-19. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kerugian bagi *image* pariwisata di DIY," ujar Biwara.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, kata Biwara, sudah memberikan arahan kepada aparat untuk melakukan tindakan tegas terkait dengan penegakan hukum di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19.

"Kalau sanksi kami masih mengacu kepada Pergub DIY No.77/2020. Kalau perorangan yang sanksi sosial, kalau tempat usaha yang operasionalnya dihentikan sementara atau ditutup. Sava kira ini menjadi momentum penegakan hukum di gugus tugas penanganan Covid-19 DIY dalam mengawasi libur akhir tahun ini," ujarnya. (Harta Yudi Supraba/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005